REFORMASI HUKUM ADAT DI SULAWESI SELATAN: ANTARA TRADISI DAN KEPENTINGAN MODERN

Muhammad Watif M¹, Herawati², Muhammad Ikbal³, Muhammad Fhath⁴, Melisa⁵
watifmuhammad@gmail.com¹, herawti31@gmail.com², muhammaikbal96380@gmail.com³,
fhath0908@gmail.com⁴, melisaalfahira2@gmail.com⁵

Universitas negeri Makassar

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara nilai-nilai tradisional dan modern. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Temuan penelitian ini mengkontraskan nilai-nilai tradisional dan modern terhadap peraturan perundang-undangan di Sulawesi. Dalam konteks hukum adat sebagai salah satu sumber utama hukum nasional, hukum adat di Asia Tenggara mempunyai perbedaan yang sangat penting. Oleh karena itu, penerapan hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) menjadi salah satu perhatian utama yang muncul dalam proses pengembangan hukum nasional.

Kata Kunci : reformasi, hukum, adat, modern.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze value reform between tradition and modern interests. This research is normative legal research. Research results that influence customary law in South Sulawesi between tradition and modern interests. In the context of the existence of customary law as a source of national law formation, customary law in South Sulawesi has a very important position. Therefore, the existence of customary law as living law is one element whose urgency is recognized in the framework of national legal development.

Keywords: reform, law, custom, modern.

PENDAHULUAN

Sebagai hukum resmi bagi anak kelahiran di Kepulauan Nusantara, Hukum Adat (*Adatrecht*) bermula dari bias-bias warga (*kawula*) terhadap kaum adat yang diakui dan diamalkan sebagai norma-norma sosial hingga dipersempit menjadi Hukum Adat terhadap anak-anak kelahiran asing di Kepulauan Nusantara. persekutuan warga dengan tetuanya (Haq, 2020).

Akibat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Kepulauan Nusantara menjadi negara berdaulat Republik Indonesia. Masyarakat Bangsa terdiri dari berbagai suku bangsa dengan adat istiadat dan tradisi unik yang diwariskan secara turun temurun sebagai pandangan hidup dan sistem hukum bagi anak-anak Indonesia.

Hukum adat Sulawesi Selatan memiliki prinsip utama yang berfokus pada kesatuan masyarakat dalam pemerintahan. Masyarakat adat di Sulawesi Selatan memiliki hak ulayat dan membentuk persekutuan adat. Hukum adat di Sulawesi Selatan ditetapkan berdasarkan kitab kuno, misalnya kitab *Amanna Gappa*, dan sebagian besar diterapkan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat, seperti hak ulayat. Dalam era modern, hukum adat tidak dominan diterapkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, dengan beberapa tradisi yang berkaitan dengan hukum adat dijadikan sebagai objek pariwisata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi penelitian kualitatif, di mana hasil atau temuan tidak diperoleh melalui cara-cara yang bersifat kuantifikasi, perhitungan, dan ukuran angka. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk memahami objek secara mendalam dan

menyajikannya secara deskriptif menggunakan kata-kata (Rukajat, 2018). Sebaliknya, dalam pendekatan penelitian kuantitatif-literatur, fokus utamanya adalah pada analisis kuantitatif dari materi literatur yang relevan. Di sini, peneliti menitikberatkan pada pengukuran, analisis statistik, dan pengolahan data yang terkandung dalam sumber-sumber literatur. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menarik kesimpulan yang didukung oleh data kuantitatif dan membuat generalisasi yang lebih kuat. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat secara sistematis mengevaluasi informasi yang ada dalam literatur, dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Adat

Menurut etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti prasangka. Oleh karena itu, menurut etimologi, adat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam jangka waktu lama sebelum menjadi sifat manusia yang tetap dan dikagumi, oleh karena itu adat.

Ada dua komentar mengenai asal usul adat. Ada salah satu kelompok yang menyatakan bahwa iklan berasal dari bahasa Arab, hal ini menunjukkan adanya bias. Selain itu, Amura dalam Hilman menyatakan bahwa istilah “adatini” berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya masyarakat Minangkabau selama ini menggunakannya untuk sekitar 2000 tahun. (Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2002)

Adat di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan (perbuatan) yang terlebih dahulu kala dituruti atau dilakukan; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lain terkait menjadi suatu sistem”.(Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002.)

B. Corak Hukum Adat

Adapun tiga corak hukum adat yaitu:

1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.

Adat ini terkait pada kebiasaan nenek moyang yang mendewa dewakan Adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa. Oleh karena itu, hukum adat sebagian besar masih bertumpu pada adat istiadat lama yang artinya hukum adat merupakan suatu benda hidup.(Danito Darwis, Landasan Hukum Adat Mkinangkabau, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM),1990.)

2. Hukum adat dapat berubah

Penghapusan peraturan dengan cara lain secara tiba-tiba, tindakan sebaliknya bertentangan dengan bunuh diri atau statistika; tetapi perubahan itu karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti. Peraturan hukum adat harus dipatuhi dan diakui sesuai dengan keadaan kehidupan sehari-hari saat ini dan peristiwa yang berdampak pada pemberlakuan peraturan adat..(Danito Darwis, Landasan Hukum Adat Mkinangkabau, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM),1990.)

3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Secara perlahan, hukum adat muncul dari kesadaran kolektif masyarakat yang lambat laun dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Perkembangan seperti ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.(Danito Darwis, Landasan Hukum Adat Mkinangkabau, Jakarta: Majelis Pembina Adat Alam Minangkabau (MPAAM),1990.)

C. Hukum Adat di Sulawesi Selatan

Hukum adat Asia Tenggara adalah bagian dari hukum adat Indonesia. Wilayah

pertama yang tercatat dijelaskan oleh Cornelis van Vollenhoven dan mencakup suku Makassar dan Bugis. Prinsip utama hukum Adat di Asia Tenggara adalah kekayaan bersama rakyat yang berada dalam pemerintahan. Penduduk Muslim di Sulawesi Selatan mempunyai hak atas kebebasan berpendapat dan berpendapat secara independen..(Warjiyati, Sri. Ulinnuha, N., dan Roqib, A., ed. Panduan Advokasi (Bagi Para legal).

Di Asia Tenggara, hukum adat didasarkan pada perangkat kuno, seperti perangkat Amanna Gappa. Sementara itu, penyebab paling umum dari berlakunya hukum perdata mudah adalah penuntutannya oleh pemimpin adat ataupun kepala desa. Saat ini masyarakat Sulawesi Selatan belum menganut agama Islam. Beberapa adat istiadat yang berkaitan dengan hukum Adat di Asia Tenggara telah ditetapkan sebagai objek pariwisata. Surat wasiat pertama yang tercatat di Sulawesi Selatan dibuat oleh Cornelis van Vollenhoven. Perdapatnya, ia menetapkannya sebagai salah satu dari 19 wilayah hukum adat di Indonesia. Prestasi bangsa yang terkurung daratan ini didokumentasikan dalam buku berjudul "Adatrecht." Dalam konteks ini, wilayah otonomi Sulawesi Selatan terbagi menjadi dua kelompok masyarakat: masyarakat Makassar dan masyarakat Bugis..(Rudi, Wijaya, R., dan Putra, M. A. (2022). Hayati, Yayat Sri, ed. Rekognisi Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Depok: PT Rajawali Pers.)

Masyarakat adat di Sulawesi Selatan membentuk suatu kesatuan dalam berbagai hal termasuk kesatuan hukum adat. Kesatuan ini hadir bersama dengan kesatuan penguasaan dan pengelolaan bersama atas lingkungan hidup oleh seluruh anggota masyarakat adat. Kesatuan-kesatuan ini menjadikan masyarakat adat di Sulawesi Selatan mampu hidup mandiri. Salah satu bentuk kesatuannya adalah wanua.(Zuhraini (2014). Dinamika Politik Hukum Indonesiaa Kesatuan Masyarakat Adat. Penerbit : Harakindo, Bandar Lampung.Hak ulayat dalam masyarakat Sulawesi Selatan dikenal dengan istilah "Limpo". Saat ini ada pihak yang mempunyai kemampuan menilai hasil kerjanya dalam kaitannya dengan wilayah adat. Hak ini diberikan kepadanya selama sjabat. Di Pasifik Selatan, pulau yang ditemukan dan ditemukan oleh masyarakatnya dikenal dengan nama Galung Arajang. Dalam masyarakat Adat di Asia Tenggara juga terdapat hak ulayat wilayah Adat Perak dan Sumber Dayan. Najisnya adalah rompong.Yulianti, Rina (2019). Seminar Nasional: Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional "Relasi Sistem Formal dan Informal dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Pesisir oleh Masyarakat Hukum Adat" Dim Sumpah Pemuda Tinggi Ilmu Hukum.

Kabupaten Maros merupakan bagian timur negara yang dikenal dengan Kerajaan Marusu. Ada tiga hukum masyarakat adat di Kabupaten Maros yang mendukung represi. Ketiganya adalah Pemerintahan Adat Lebbo Tengngae, Pemerintahan Adat Todde Limae, dan Pemerintahan Adat Gallarrang Appaka. Kitab Hukum Amanna Gappa adalah seperangkat peraturan yang berkaitan dengan hukum maritim dan patroli maritim. Halaman ini digunakan sebagai panduan oleh warga Wajo, Sulawesi Selatan..(Syamsuddin, R., dan Aris, I. (2014). Pabbu, Amiruddin, ed. Merajut Hukum di Indonesia Jakarta: Mitra Wacana Media).

D. Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan

Tiga halakh pola hidup masyarakat Sulawesi Selatan mengalami perubahan. Yaitu hukum modern yang bersumber dari dunia Barat, hukum Islam yang bersumber dari syariah, dan hukum adat. Sistem hukum yang dominan adalah hukum Islam dan hukum modern dari dunia Barat. Namun penerapan syariat Islam hanya terbatas pada aspek tertentu dalam kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Hukum dunia Barat khususnya

bermasalah ketika menggunakan kartu kredit. Penduduk Sulawesi Selatan: Syariah Islam mendominasi hukum pernikahan sebagai beragam sebagaimana beragam Islam. Sebaliknya, hukum pada umumnya hanya berlaku pada ulayat. Di Asia Tenggara, istilah “hudat” mengacu pada hukum data pribadi. Praktik ini terjadi di dalam batas desa, dan pelaksanaannya biasanya diawasi oleh kepala desa atau ketua pengadilan adat. Pemberlakuannya terdiri dari perkara-perkara perdata yang sifatnya berguna. (Syamsuddin, R., dan Aris, I. (2014). Pabbu, Amiruddin, ed. Merajut Hukum di Indonesia Jakarta: Mitra Wacana Media).

Undang-Undang Desa mempunyai hak tersebut kepada pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan desa. Masyarakat di kabupaten ini lebih kompak karena adanya beberapa program seperti pemberdayaan dan desakralisasi. Pemerintah desa dapat mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong peningkatan ekonomi desa, dan melakukan pola peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari desa untuk membangun bangsa yang tabah (Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Litigasi Amsir, 9(4), 257-264.)

E. Tradisi Upacara Adat Sulawesi Selatan

1. Upacara Ma'nene

Tradisi Ma'nene mungkin perlahan-lahan hilang oleh penduduk di luar Sulawesi Selatan. Upacara ini berasal dari Toraja, dan cukup unik karena melibatkan kehadiran seorang leluhur, mungkin sudah dilakukan selama beberapa tahun. Suku Toraja terkenal sebagai suku yang sangat meningkatkan kenikmatannya. Dengan semangat kemurahan hati, mereka melaksanakan ritual Ma'nene ini. Selain itu, mereka juga membeli bayi atau kerbau sebagai bentuk penghormatan. Mereka menyadari bahwa arwah leluhur tidak akan mencapai puncak jika anggota kelompoknya tidak berperilaku babi atau kerbau. Berapapun jumlah hewan yang mereka simpan, harus sesuai dengan jumlah jenazah yang ada di liang Makam. Mereka harus melakukan upacara khusus untuk membuat Makam bagi anggota keluarga mereka yang masih hidup dengan menempatkan sirih di bawah Makam. Ritual ini dikenal juga dengan nama Pa'tene. Anggota kelompok yang sudah .

2. Rambu Tuka

Selalu ada semacam upacara adat dari suatu daerah tertentu dengan tujuan memperoleh sesuatu. Di Pasifik Selatan, peristiwa seperti itu dikenal dengan nama Rambu Tuka, atau bahkan Rampe Mata Allo. Pemberontakan ini dilakukan oleh masyarakat Toraja ketika mereka sedang merenovasi rumah atau melakukan perbaikan bangunan hasil panennya. Rambu Tuka dilakukan di depan pintu rumah atau tongkonan, sesuai dengan tradisi yang sudah ada sejak lama. Sebelum hari kesepuluh, mereka menampilkan Rambu Tuka.

Rambu Tuka mempunyai beberapa tahapan yang masing-masing tahapan tersebut akan memberikan suguhan yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa pembelajaran dari upacara Rambu Tuka tersebut:

1. Kapuran Panggan yang menggambarkan pinang sirih.
2. Menyajikan satu batang lemay dalam bambu Piong Sanglampa.
3. Mempersembahkan kurban ayam, ma'pallin.
4. Ma'tadoran, menekankan perbedaan antara ayam dan babi seekor.
5. Ma'pakande Deata Dao Banua menyajikan satu ekor babi kepada seluruh keluarga yang diundang.
6. Massura' Tallang adalah upacara yang dilakukan setelah setiap langkah sebelum selesai.
7. Merok, kepada Puang Matua, yaitu mempersembahkan kerbau, babi, dan ayam.

3. Rambu Solo

Rambu Solo merupakan salah satu ritual Sulawesi Selatan yang juga dilakukan oleh masyarakat Toraja. Rambu Solo merupakan upacara penguburan jenazah. Tujuannya untuk menandai peralihan dari dunia lama ke dunia baru (Puyo). Dalam lakon ini, para karakter akan berperan sebagai sebuah keluarga, tinggal di rumah dan memerankan peran layang-layang hingga akhir, memerankan lakon Rambu Solo. Mending masih ditidurkan di tempat tidur, dilakukan minum dan makanan. Bagi mereka, seseorang belum bisa dikatakan mati jika pemberontakan Rambu Solo tidak terwujud sepenuhnya. Mereka juga akan patah semangat jika tidak mampu menyelesaikan ritual Rambu Solo, karena untuk melaksanakan ritual ini memerlukan biaya yang tidak sedikit karena anggota kelompok harus membeli perlengkapan bayi dan bahan bangunan yang nantinya akan diberikan kepada kelompok perang lainnya.

4. Accera Kalompoang

Tujuan dari adat Sulawesi Selatan ini adalah untuk menonjolkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Gowa di Provinsi Gowa Sulawesi Selatan. Benda-benda pusaka tersebut di atas saat ini dipajang di Museum Balla Lompoa. Namun benda-benda pusaka yang dimaksud cukup mahal; diantaranya adalah saloka (mahkota) yang terbuat dari emas murni dengan 250 butir berlian. Lalu ada juga sudanga, senjata yang juga mengandung putih emas. Masih banyak lagi benda-benda yang merupakan perhiasan senjata dan pusaka yang akan diungkap pada upacara Accera Kalompoang. Totalnya ada 15 benda pusaka. Acara ini diadakan pada hari Idul Adha, yaitu setelah selesainya shalat di masjid pada hari Idul Fitri. Meskipun demikian, lakon ini merupakan pembacaan pidato salah satu Raja Gowa yang dikenal dengan nama I Mangngarrangi Daeng Mangrabbia Karaeng Lakiung Sultan Alauddin.

5. Katto Bokko

Setiap tahun, pada bulan April atau Maret, Adat Katto Bokko dipentaskan. Mereka makan terakhir kali sebelum akhir bulan ini. Ini adalah cerita pendek tentang masyarakat yang terpaksa meninggalkan rumah dan pergi ke Balla Lompoa, sebuah rumah adat di wilayah Maros, setelah selesai shalat subuh. Mereka kemudian menuju altar sambil membungkuk dan berdenting gendang. Perjalanan menuju altar juga merupakan perjalanan berbeda dalam kisah Katto Bokko. Mereka bahkan berhasil sampai ke sawah adat dengan Kakaraengan Marusu yang sudah siap ditumbuk. Di satu sisi, pemandu akan berbelok ke kiri dan menggunakan anai-anai untuk memotong padi. Mereka perlu mengenali pola-pola ini dan mengambil langkah-langkah kecil untuk mengatasinya.

Di antara padi-padi ikatan itu dibuat dua buah yang lebih besar dari dua buah lainnya untuk disapu dan menjadi tanda peringatan. Tujuan Katto Bokko tidak hanya untuk memperkuat ikatan lokal melalui penggunaan alat-alat tradisional sepanjang proses memori-memori, tetapi juga sebagai pengawas dan pembimbing.

6. Upacara Mappacci

Setiap daerah pasti mempunyai sistem adat yang handal dalam upacara inisiasi. Di Asia Tenggara, pemberontakan ini dikenal dengan nama pemberontakan Mappacci. Upacara ini dilakukan oleh masing-masing kedua mempelai pada hari menjelang pernikahan. Calon pengantin duduk dibunuh oleh kalian berdua. Sebelum acara dimulai, ada adat yang mencantumkan barang-barang yang diperlukan agar acara Mappacci berjalan lancar. Barang-barang tersebut antara lain bantal (angkaluneng), sarung sutera (lipa sabbe), daun nangka, daun pisang, lilin, berondong beras (benno), dan daun pacci. Setiap item ini mewakili seorang makna. Misalnya, mereka menawarkan lilin sebagai panduan untuk membantu perjalanan penguin, atau beras yang melambangkan perjalanan panjang.

Tujuan pemberontakan Mappacci adalah untuk mengekspos diri pada segala aspek yang dapat membahayakan pernikahan. Tujuan dari upacara Mappacci adalah membersihkan diri dari segala hal yang bisa menghalangi kepada pernikahan. Keluarga besar pun turut menghadiri, sebagai simbol membekali kedua calon pengantin dengan doa restu.

KESIMPULAN

Reformasi Hukum Adat di Selatan telah menjadi topik pertimbangan penting dalam konteks perkembangan hukum Indonesia. Dalam konteks ini, reformasi hukum Adat di Sulawesi Selatan telah mengalami beberapa perubahan signifikan yang mempengaruhi kemampuan masyarakat Adat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menghadapi modernisasi.

Reformasi adat di Sulawesi Selatan telah menghadapi tantangan modernisasi, mengalami kesulitan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam, dan mempengaruhi cara masyarakat adat berinteraksi dengan pemerintah.

Reformasi hukum Adat di Sulawesi Selatan telah menjadi topik diskusi yang penting dalam konteks reformasi hukum di Indonesia. Reformasi ini telah mempengaruhi cara masyarakat umum menangani uang, menghadapi tantangan modernisasi, dan berinteraksi dengan pemerintah.. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat upaya untuk mengintegrasikan hukum adat dengan hukum nasional, sehingga masyarakat adat dapat lebih efektif mengelola sumber daya alam, menghadapi tantangan modernisasi, dan mengembangkan nilai-nilai budaya yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2018). Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190.
- Gunawan, S., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Terhadap Hutan Adat Di Kabupaten Bulukumba.
- Ridwan, R., Dimiyati, K., & Azhari, A. F. (2017). Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 106-115.
- Sugiswati, B. (2012). Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di indonesia. *Perspektif*, 17(1), 31-43.
- Sudirman, S., Yunus, A., & Arif, M. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat Dalam Mewujudkan Hukum Yang Bersendikan Kearifan Lokal. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 89-106.
- Thontowi, J. (2015). Pengaturan masyarakat hukum adat dan implementasi perlindungan hak-hak tradisionalnya. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).